

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* khususnya pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa kesimpulan yang sama dan ada juga yang memiliki kesimpulan berbeda mengenai pengaruh pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berikut kesimpulan dari beberapa peneliti terdahulu.

##### 1. **Asyhari (2016)**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan manajerial, *leverage* serta likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari *annual report* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014 serta menggunakan metode *purposive sampling* pada pemilihan sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif model regresi liner berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Komite Audit, *leverage* dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan Dewan Komisaris Independen, Dewan

Pengawas Syariah dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, likuiditas dan *leverage* sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Dewan Komisaris Independen dan kepemilikan manajerial, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- b) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2011-2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

## 2. Baidok dan Septiarini (2016)

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap

Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan prosedur penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah pada periode 2010-2014 yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan melalui website masing-masing perusahaan perbankan syariah. Teknik analisis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Dewan Komisaris Independen, frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi

Rapat Komite Audit, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Direksi, Komite Audit, *leverage* dan likuiditas.

- b) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2010-2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

### 3. Lestari (2016)

Penelitian ini membahas tentang pengaruh tingkat profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah Indonesia tahun 2010-2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder menggunakan prosedur penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014. Teknik analisis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan teknik regresi liner berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan *leverage* dan likuiditas sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Koimte Audit dan Dewan Pengawas Syariah.
- b) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2010-2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

#### **4. Sunarto (2016)**

Penelitian ini membahas tentang *Shariah Governance* dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* dan *Global Reporting Index* pada Perbankan Syariah periode 2010-2013. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *shariah governance* yang diukur dengan Direksi Bank Syariah, Dewan

Pengawas Syariah, dan Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* (ISRI) dan *Global Reporting Index* (GRI). Data yang digunakan merupakan data sekunder prosedur penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut dan lengkap selama periode 2010-2013, perbankan syariah yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan satuan nilai rupiah dan perbankan syariah yang telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama tahun 2010-2013. Teknik analisis penelitian yaitu analisis kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda dan *Independent Samples T-test*. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen Dewan Direksi bank Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sedangkan Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit tidak berpengaruh.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting* sedangkan Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Dewan Direksi Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Komisaris, *leverage* dan likuiditas.

- b) Dalam mengukur tingkat pengungkapan sosial, penelitian terdahulu menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (ISRI) dan *Global Reporting Index* (GRI) sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan *Islamic Social Reporting Index*.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2010-2013, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.
- d) Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan *Independent Samples T-test*, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
- e) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

5. **Rita, dkk (2015)**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *islamic governance score* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *Islamic governance score* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder menggunakan prosedur penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode

2010-2012. Teknik analisis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan teknik regresi liner berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel *Size* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sedangkan variabel profitabilitas, *leverage* dan *Islamic goverance score* yang diukur menggunakan jumlah, *cross membership*, latar belakang pendidikan, dan reputasi Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan *leverage* dan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas dan *islamic goverance score*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan likuiditas.
- b) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2010-2012, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

## 6. Arshad, et al (2014)

Penelitian ini membahas tentang *Board Composition, Islamic Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation of Islamic Banks*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari *Independent Non-Executive Directors, Muslim Board Members, Top Management Support, Board members with international experience, Corporate Reputation* dan *Firm size* terhadap pengungkapan ISR. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan prosedur penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Malaysia tahun 2008–2010. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Independent Non-Executive Directors, Muslim Board Members* dan *Firm size* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan *Top Management Support, Board members with international experience* dan *Corporate Reputation* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *Independent Non-Executive Directors, Top Management Support, Corporate Reputation* dan *Firm size*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Direksi, Komite Audit, likuiditas dan *leverage*.
- b) Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Malaysia. Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).
- c) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2008-2010, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.

#### 7. **Hidayati (2014)**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada bank syariah yang terdaftar di OJK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan ISR. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan prosedur penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perbankan syariah yang telah terdaftar di OJK pada tahun 2011-2013 dan perbankan syariaiah yang memiliki laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2011-2013. Teknik analisis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan

teknik regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan profitabilitas, *leverage* dan Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan *leverage* sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Direksi, Komite Audit dan likuiditas.
- b) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2011-2013, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

#### **8. Putra, et al (2014)**

Penelitian ini membahas tentang *Determinant on Islamic Social Reporting in Islamic Banking (Case Study in Indonesia)*. Tujuan penelitian ini

untuk mengetahui signifikansi pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Data yang digunakan merupakan data sekunder prosedur penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria melaporkan laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan yang terdapat dalam website bank yang bersangkutan dan laporan keuangan yang terkandung di Bank Indonesia. Teknik analisis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan *leverage* dan likuiditas sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan dan *Corporate Governance*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.
- b) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2012, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.

- c) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

#### 9. Rama (2014)

Penelitian ini membahas tentang analisis determinan pengungkapan *Islamic Social Reporting*: studi kasus Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh ukuran bank, umur bank, profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel data diperoleh dari *annual report* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2012 serta menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kuantitatif menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran bank berpengaruh positif signifikan sedangkan variabel umur bank, profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan *leverage* sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran bank, umur bank dan profitabilitas, sedangkan penelitian saat ini menggunakan

variabel independen lain yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan likuiditas.

- b) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2010-2012, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

**10. Khoirudin (2013)**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Data yang digunakan merupakan data sekunder menggunakan prosedur penentuan sampel metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerbitkan *annual report* tahun 2010-2011. Teknik analisis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia sedangkan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

Persamaan :

Variabel dependen yang digunakan yaitu *Islamic Social Reporting*, sedangkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel independen Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen lain yaitu Dewan Direksi, Komite Audit, *leverage* dan likuiditas.
- b) Penelitian terdahulu menggunakan periode sampel tahun 2010-2011, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode sampel tahun 2012-2016.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sensus (sampling jenuh).

Tabel 2.1  
Matriks Penelitian

No	Nama Pengarang	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah	Leverage	Likuiditas
1	Asyhari (2016)	-	-	S+	TS	S+	S+
2	Baidok dan Septiarini (2016)	S+	-	-	S+	-	-
3	Lestari (2016)	-	-	-	-	TS	TS
4	Sunarto (2016)	-	S+	TS	TS	-	-
5	Rita,dkk (2015)	-	-	-	TS	TS	-
9	Arshad, et al (2014)	TS	-	-	S+	-	-
7	Hidayati (2014)	TS	-	-	S+	TS	-
8	Putra, et al (2014)	-	-	-	-	TS	TS
6	Rama (2014)	-	-	-	-	TS	-
10	Khoirudin (2013)	S+	-	-	TS	-	-
11	Charles (2012)	S+	TS	S+	-	-	-

Keterangan :

TS : Tidak Signifikan

S+ : Berpengaruh Positif Signifikan

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk mendasari serta mendukung penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori yang dipilih untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 2.2.1 *Shari'ah Enterprise Theory (SET)*

*Shari'ah Enterprise Theory (SET)* menjelaskan mengenai internalisasi kegiatan perusahaan dengan nilai tauhid. Dari teori ini kita dapat memperoleh legitimasi untuk menerapkan konsep kepemilikan pada islam, konsep sosial, konsep keadilan dan konsep pertanggungjawaban. Pada *Shari'ah Enterprise Theory (SET)*, lebih lanjut Iwan (2012:266) menjelaskan, akasioma terpenting yang harus mendasari pada setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Prinsip yang berlaku pada *Shari'ah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama karena Allah SWT adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang padanya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanat. Seperti yang terkandung pada QS Al-Baqarah (2) ayat 254 dan 267 yang artinya :

“ *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.*” (QS Al-Baqarah : 254)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah : 267)*

Manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Sehingga mendorong *Shari'ah Enterprise Theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *Shari'ah Enterprise Theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stakeholders, stockholders, masyarakat dan lingkungan alam* tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Iwan, 2012:268).

Disimpulkan bahwa, *Shari'ah Enterprise Theory* menjadi dasar dari seluruh kegiatan perusahaan terutama pada perbankan syariah. *Shari'ah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utama secara vertikal kepada Allah SWT dan bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu pada umat manusia dan lingkungan alam. Sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah yang telah diberikan oleh masyarakat, perbankan syariah memiliki tugas untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi *stakeholder* dan lingkungan alam. Pentingnya pertanggungjawaban itu, mendorong perbankan syariah lebih transparan pada pengungkapan dan pendistribusian dana sosial yang diberikan untuk kesejahteraan umat.

Hubungan *Shari'ah Enterprise Theory* dengan penelitian ini adalah Bank Umum Syariah sebagai salah satu perusahaan dengan mendasarkan kegiatan berdasarkan syariat islam, haruslah menjaga amanah dan melakukan peran sebagai *Khalifatullah fil Ardh* dengan sebaik-baiknya karena semua yang akan dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak hanya di dunia melainkan di akhirat kelak. Pelaksanaan kegiatan perusahaan harus didasarkan pada ketentuan Allah SWT. Perbankan syariah haruslah dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada *stakeholder*, tetapi masyarakat dan lingkungan alam. Sehingga perlu adanya kontrol pada pelaksanaan kegiatan sosial Bank Umum Syariah melalui pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### 2.2.2 Teori Legitimasi

Gray, *et.al* (1996) dalam Hadi (2011:87) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi dan berpihak kepada masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis perusahaan dalam rangka pengembangan perusahaan kedepannya. Legitimasi dapat dijadikan sebagai bentuk untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2011:88). Dalam perspektif teori legitimasi suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik. Penerimaan yang baik dari masyarakat

dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Legitimasi menjadikan pengakuan sosial yang baik di dalam masyarakat, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Hadi, 2011:89).

Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada pada sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai itu selaras, hal tersebut dapat dikatakan sebagai legitimasi perusahaan. Begitu sebaliknya ketika ada perbedaan antara kedua sistem nilai yang dianut antara perusahaan dengan masyarakat, legitimasi perusahaan akan terancam.

Dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi lebih menekankan pentingnya hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan selain fokus pada kelangsungan internal perusahaan, juga memperhatikan nilai-nilai dan norma yang mereka gunakan pada operasional perusahaan sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat dan lingkungan. Salah satu dorongan untuk mengurangi ancaman legitimasi dari masyarakat, perusahaan akan berusaha mengungkapkan unsur sosial tersebut pada laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hubungan teori legitimasi dengan penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan jenis perbankan lain

yaitu pada fungsi sosialnya serta sifat amanah yang di terapkan pada perbankan syariah, sehingga perbankan syariah dituntut harus selalu menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terutama yang berhubungan dengan *kemaslahatan umat*. Bank Umum Syariah haruslah mampu untuk menjaga hubungan baik antara bank, masyarakat dan Allah SWT sesuai dengan norma Syariah. Legitimasi akan meningkat sejalan dengan semakin baiknya hubungan Bank Umum Syariah dengan norma sosial dan syariah. Semakin tinggi tingkat pengungkapan sosial, menunjukkan semakin tinggi keselarasan hubungan yang diharapkan oleh masyarakat dan Bank Umum Syariah. Masyarakat akan meningkatkan kepercayaan dan memberikan citra baik bagi perusahaan, sedangkan dari pihak Bank Umum Syariah menjalankan dengan baik amanah dan prinsip bank syariah sebagai bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Untuk mengurangi ancaman legitimasi dari masyarakat, perbankan syariah akan berusaha mengungkapkan unsur sosial perusahaan dalam bentuk *Islamic Social Reporting* sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

### **2.2.3 Teori Sinyal**

Menurut Brigham dan Houston (2012:184) teori sinyal merupakan tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan

datang bagi kelangsungan perusahaan dan efek yang ditimbulkan pada perusahaan. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi positif pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Menurut Suwarjono (2013:583) *Signalling teori* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan segala bentuk informasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sosial pada pihak eksternal serta memiliki fungsi dalam menekankan informasi penting yang berguna bagi para investor dalam menetapkan keputusan untuk pihak luar. Teori sinyal menjelaskan mengenai dorongan perusahaan dalam memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut muncul karena didasari adanya asimetri informasi sehingga perusahaan perlu mengungkapkan informasi yang dimiliki baik informasi keuangan maupun non keuangan (Bringham dan Huston, 2012:185-186).

Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini adalah adanya dorongan Bank Umum Syariah untuk memberikan informasi yang disebabkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal, dimana perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor). Secara garis besar *signalling theory* erat kaitanya dengan ketersediaan informasi tidak hanya laporan keuangan tetapi juga termasuk laporan pertanggungjawaban sosial yang diungkapkan oleh perusahaan. Dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial

yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak luar tentang kredibilitas dan tingkat pemenuhan amanah yang tinggi pada Bank Umum Syariah.

#### **2.2.4 Islamic Social Reporting**

*Islamic Social Reporting* pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam penelitian yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. *Islamic Social Reporting* adalah standar pelaporan kinerja perusahaan berbasis syariah. Indeks ini lahir dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI. Secara khusus, indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan pada perekonomian, tetapi juga peran perusahaan pada perspektif spiritual. Indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010).

*Islamic Social Reporting* (ISR) memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan muslim. Kegiatan sosial yang berhubungan dengan manusia maupun lingkungan erat kaitannya dengan firman Allah SWT pada QS surat Al-Araf ayat 56 yang artinya sebagai berikut.

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas pada ekonomi Islam. Akuntabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi pada memberikan keberkahan dan kesuksesan. Dengan kata lain akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam.

*Islamic Social Reporting Index (ISR)* yang merupakan pengembangan pengungkapan tanggungjawab sosial sesuai prinsip syariah. Indeks ISR merupakan tolok ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman et al, 2009). Sesuainya indeks ISR untuk entitas islam karena mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi dan gharar, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah

serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Asrori, 2015). Indeks ISR kemudian dikelompokkan menjadi enam indikator pengungkapan yaitu : (1) Investasi dan keuangan, (2) Produk dan Jasa, (3) Tenaga Kerja, (4) Sosial, (5) Lingkungan dan (6) Tata Kelola Organisasi. Berikut tabel *Islamic Social Reporting Index (ISR)*.

Tabel 2.2  
*Islamic Social Reporting Index (ISR)*

No	Item	Sub item
1	Investasi Dan Keuangan	1. Aktivitas Riba - Identifikasi aktivitas yang mengandung riba - % dari profit
		2. Gharar - Identifikasi aktivitas yang mengandung gharar - % dari profit
		3. Zakat - Metode yang digunakan - Sumber zakat - Jumlah zakat - Penerima zakat - Opini Dewan Pengawas Syariah mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat
		4. Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent clients - Identifikasi kebijakan untuk menanggulangi insolvent clients - Besarnya biaya tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran - Opini Dewan pengawas syariah terkait dengan izin mengenai biaya tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran oleh insolvent clients
		5. Current Value Balance Sheet
		6. Value Added Statements

No	Item	Sub item		
2	Produk dan Jasa	7. Status halal atau syariah dalam produk		
		8. Pengembangan produk		
		9. Peningkatan pelayanan		
		10. Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total keluhan konsumen</li> <li>- Penanganan keluhan tersebut</li> <li>- Denda baik uang maupun non uang terkait pelanggaran peraturan</li> <li>- Survei atas kepuasan pelanggan</li> </ul>		
3	Tenaga Kerja	11. Karakteristik pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah jam kerja dan hari libur</li> <li>- Remunerasi</li> <li>- Rasio gaji</li> <li>- Komposisi karyawan berdasarkan kriteria tertentu</li> </ul>		
		12. Pendidikan dan pelatihan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan</li> <li>- Membangun program dan jenjang karir karyawan</li> <li>- Strategi retensi karyawan</li> <li>- Prosentase karyawan yang menerima pengembangan karir</li> </ul>		
		13. Kesempatan yang sama		
		14. Kesehatan dan keselamatan kerja		
		15. Lingkungan kerja		
		16. Perekrutan khusus		
		4	Sosial	17. Shadaqoh/Donasi
		18. Wakaf		
		19. Qard hasan		
		20. Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah		
21. Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendirian sekolah</li> <li>- Bantuan pada sekolah dalam bentuk finansial atau non finansial</li> <li>- Beasiswa</li> </ul>				
22. Bantuan kesehatan				
23. Pemberdayaan ekonomi				

No	Item	Sub item
		24. Kepedulian terhadap anak yatim piatu
		25. Pembangunan atau renovasi masjid
		26. Kegiatan kepemudaan
		27. Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)
		28. Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain
5.	Lingkungan	29. Kampanye go green
		30. Konservasi lingkungan
		31. Perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar atau terancam punah
		32. Polusi
		33. Perbaikan dan pembuatan sarana umum
		34. Audit lingkungan
		35. Kebijakan manajemen lingkungan
6.	Tata Kelola Organisasi	36. Profil dan strategi organisasi
		37. Struktur Organisasi
		38. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
		39. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
		40. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
		41. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
		42. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
		43. Penanganan benturan kepentingan
		44. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
		45. Penerapan fungsi audit intern
		46. Penerapan fungsi audit ekstern
		47. Batas maksimum penyaluran dana
		48. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
		49. Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
		50. Etika Perusahaan

Sumber : Khusnul dan Prabowo (2013)

### 2.2.5 *Corporate Governance*

*Corporate Governance* menurut forum *for Corporate Governance in Indonesia* (2001:2) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan *stakeholders* dan *shareholder* dalam perusahaan antara lain para pemegang saham, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Organization for Economic Cooperation and Development* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai struktur hubungan yang berkaitan dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan *Corporate Governance* adalah struktur perusahaan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian tanggung jawab dari masing-masing unsur pembentuk struktur perusahaan, mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perusahaan, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perusahaan mulai dari RUPS, direksi, komisaris, dan unsur-unsur luar perseroan yang hakikatnya merupakan *stakeholders* suatu perusahaan. Menurut surat edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs tahun 2010 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, unsur *Corporate Governance* yang terdapat dalam Bank Umum Syariah adalah meliputi Dewan Komisaris, Dewan

Direksi, Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi), Dewan Pengawas Syariah serta penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal. Sedangkan unsur *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah. Berikut penjelasan dari unsur-unsur tersebut.

#### **2.2.6 Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia pasal 8 (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- 1) Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 3) Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.
- 4) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Dewan komisaris mempunyai fungsi yang penting dalam perbankan Syariah yaitu pengawasan

terhadap manajemen. Dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki, maka dewan komisaris dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan segala bentuk pelaporan perusahaan termasuk pengungkapan sosial yang terdapat didalam perusahaan.

### **2.2.7 Dewan Direksi**

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut pasal 92 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 disebutkan bahwa pengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Ketentuan ini menugaskan Dewan Direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Hal ini perlu mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi jika hanya dijalankan oleh satu orang anggota Direksi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- 2) Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 4) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

### **2.2.8 Komite Audit**

Komite Audit adalah komite yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 36 menjelaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 bahwa tugas dan tanggungjawab Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik. Adanya tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Audit dapat mengevaluasi dalam sejauh mana pengungkapan sosial yang telah dilakukan oleh perbankan syariah.

### 2.2.9 Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah sendiri mempunyai wewenang mengawasi dan melaporkan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, yang meliputi seluruh aspek kegiatan sosial pada perusahaan seperti zakat, infaq dan kegiatan sosial masyarakat yang lain yang dapat tercermin pada *Islamic Social Reporting*.

#### Tugas dan Tanggung Jawab DPS

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- 4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Menurut keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001 fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasan DPS.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
- 4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DPS.

Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan pemenuhan prinsip syariah terutama pemenuhan sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah termasuk juga dalam pengungkapan sosial yang dilaksanakan.

#### **2.2.10 Leverage**

*Leverage* menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Harahap (2015:301) mendefinisikan, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Rasio *leverage* yang lain adalah *Capital Adequency Ratio* yang menunjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus berlaku bagi industri-industri yang berada di bawah pengawasan pemerintah misalnya bank dan asuransi. Rasio ini menunjukkan sejauhmana modal pemilik saham dapat menutupi aset beresiko. Hanafi dan Halim (2016:79) menjelaskan bahwa ada beberapa macam rasio *leverage* yang bisa dihitung yaitu rasio total hutang terhadap total aset, rasio utang

modal saham, rasio *Times Interest Earned*, rasio *Fixed Charges Coverage*. Rasio *Times Interest Earned* mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. Rasio ini juga dapat menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio *Fixed Charges Coverage* menghitung kemampuan perusahaan membayar beban tetap total, termasuk biaya sewa meskipun sewa bukan hutang tetapi sewa merupakan beban tetap dan mengurangi kemampuan utang perusahaan.

### 2.2.11 Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aset lancar dan utang lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi semua utang lancar. Harahap (2015:301) menjelaskan rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada di atas 1 atau di atas 100 persen. Artinya aset lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Harahap (2015:302) menjelaskan rasio-rasio likuiditas yang lain yaitu *Quick Ratio* yang menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Rasio kas atas aset lancar menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aset lancar. Rasio kas atas utang lancar menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar serta rasio aset lancar dan total aset yang menunjukkan porsi aset lancar atas total aset.

## 2.2.12 Pengaruh Antar Variabel Independen dengan Variabel Dependen

### 1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan pada perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi. Semakin besar Dewan Komisaris semakin baik pula pengawasan yang dilakukan, termasuk pengawasan terhadap prinsip sosial yang ada di Bank Umum Syariah. Terciptanya pengawasan yang baik diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen sebagai bentuk pelaksanaan amanah dan tanggung jawab penuh perusahaan yang sejalan dengan *Syariah Enterprise Teori*. Dengan adanya struktur Dewan Komisaris akan mewujudkan pengelolaan dan akuntabilitas tinggi yang dapat menciptakan hubungan baik kepada masyarakat sehingga kontrak sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan teori legitimasi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2016), Khoirudin (2013) serta Charles (2012) bahwa terdapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Dewan Direksi adalah dewan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Direksi merupakan unsur *Corporate*

*Governance* yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dewan Direksi memiliki peranan tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan masa mendatang. Sehingga perlu komposisi jumlah Dewan Direksi yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Semakin besar jumlah Dewan Direksi, maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga akan meningkat. Terlaksananya dengan baik tugas dan fungsi Dewan Direksi tersebut maka dapat terwujudnya bentuk pemenuhan amanah yang diberikan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pada *Syariah Enterprise Teori*, serta keselarasan hubungan antara masyarakat dan Bank Umum Syariah juga dapat terwujud sesuai dengan teori legitimasi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Sunarto (2016) bahwa terdapat pengaruh positif Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **3. Pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.**

Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Dewan Komisaris yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam hal mengevaluasi laporan audit dan laporan *Good Corporate Governance*. Semakin besar jumlah anggota Komite Audit, maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* dapat meningkat karena peran Komite Audit harus mampu memberikan gambaran hasil pemeriksaan perusahaan dalam segi

operasionalnya dengan memperhatikan aspek-aspek syariah di dalamnya. Sejalan dengan *Syariah Enterprise Teori* dan teori legitimasi, dengan adanya struktur Komite Audit yang baik akan mewujudkan pelaporan dan pengevaluasian yang tinggi sehingga dapat dijadikan bentuk pertanggung jawaban baik kepada Allah SWT maupun lingkungan masyarakat. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) dan Charles (2012) bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.**

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ yang berwenang untuk memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Terlaksananya dengan baik seluruh tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah akan mewujudkan tingkat akuntabilitas tinggi sehingga dijadikan bentuk pelaksanaan amanah kepada Allah SWT dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai internalisasi kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah. Hal ini berhubungan dengan dengan *Syariah Enterprise Teori*, serta menciptakan hubungan baik kepada masyarakat atas pengungkapan tersebut sebagai bentuk legitimasi masyarakat. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2016), Arshad, *et al* (2014) dan Hidayati (2014) bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

##### **5. Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.**

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang pada pembiayaan investasi. Harahap (2015:301) menjelaskan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin besar tingkat *leverage* suatu perusahaan menganggap perlu memberikan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial karena pada prinsip syariah segala bentuk hubungan, baik dengan pihak internal maupun eksternal, perusahaan harus memberikan segala bentuk pertanggungjawabannya. Segala bentuk tanggung jawab harus dilaporkan terlebih lagi jika sudah berhubungan dengan pihak luar karena hal ini juga termasuk salah satu bentuk pelaksanaan amanah dan kontrol perusahaan dalam menjalankan organisasinya sesuai dengan prinsip Syariah yang terdapat dalam *Syariah Enterprise Teori*. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.

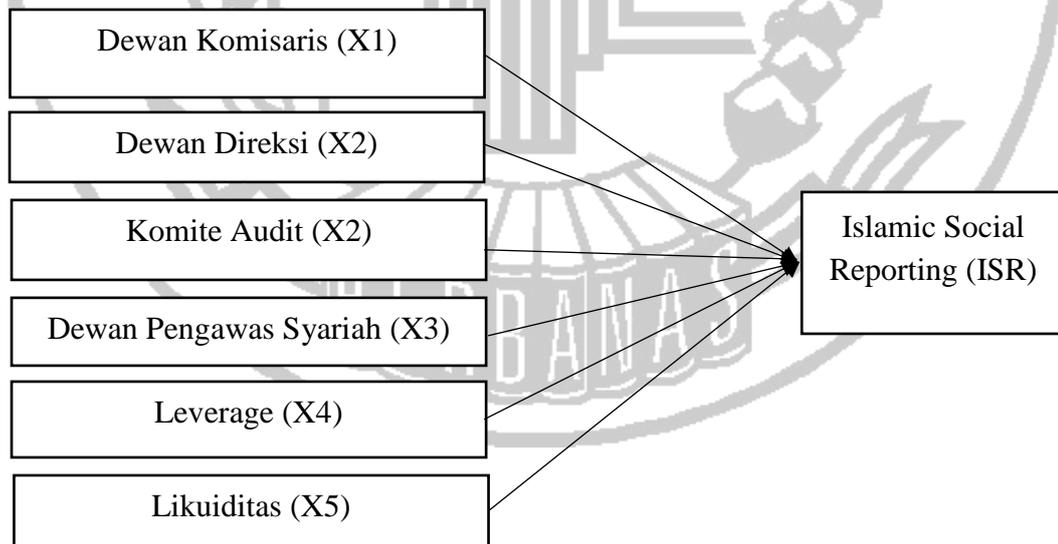
##### **6. Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.**

Harahap (2015:301) mendefinisikan likuiditas sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan lain bahwa mereka lebih kredibel dibanding perusahaan lainnya sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar. Sinyal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

dilakukan. Prinsip syariat islam dalam *Sharia Enterprise Theory* mewajibkan segala perlakuan harus dipertanggungjawabkan keberadaanya, terlebih lagi jika semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan diharapkan semakin tinggi pula kemampuan pengungkapan ISR. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat kerangka pemikiran untuk mempermudah pada memahami pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, *Leverage* dan Likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran diatas menggambarkan pengaruh dari variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen ditunjukkan dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, *leverage* dan likuiditas. *Islamic Social Reporting* merupakan variabel dependen. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* disebabkan apabila Bank Umum Syariah melakukan pelaksanaan *Corporate Governance* dengan baik, melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan serta saling mendukung dalam segala bentuk pengungkapan termasuk juga pengungkapan sosial Bank Umum Syariah maka tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* diharapkan juga ikut meningkat.

Selain unsur *Corporate Governance* tersebut, *leverage* juga dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dikarenakan setiap liabilitas jangka panjang yang dimiliki Bank Umum Syariah mengandung unsur dana dari pihak luar sehingga perlu adanya pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang baik sebagai amanah yang diberikan pihak luar tersebut. Likuiditas dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dikarenakan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan secara lebih luas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu upaya untuk memberikan sinyal positif bagi para investor mengenai kredibilitas dan tingkat pemenuhan amanah yang telah mereka lakukan.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Melihat dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah serta kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

H2 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

H4 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

H5 : *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

H6 : Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*